



SURAT KETERANGAN
Nomor: KI.01/ -Diskominfo/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yayan Ahmad Brilyana,S.Sos,M.si
NIP : 19731127 199303 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

dengan ini

Merekomendasikan

Kepada :

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Untuk Pengajuan : Pembuatan aplikasi **SIPESAT** dengan nomor pengajuan **PENGAJUAN_0004**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 26 Juli 2022
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Lampiran : Surat Keterangan

Nomor : KI.01/ -Diskominfo/VII/2022

Tanggal : 26 Juli 2022

PENGAJUAN SISTEM INFORMASI	
PEMOHON	
Nama Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Nama Pekerjaan	SIPESAT
Narahubung / No. HP	RIKKE SITI FATIMAH, SP / 082113415937
DOKUMEN	
Surat Pemohon Nomor	PENGAJUAN_0004
Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan	Ada / Tidak
Sumber Data	
Dasar Analisis Kebijakan	
1	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diturunkan ke dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di antaranya mengamanatkan implementasi arsitektur SPBE. Tujuan dari implementasi Arsitektur SPBE, di antaranya yaitu untuk menata proses bisnis pemerintahan, kemudian mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, selanjutnya menerapkan standardisasi TIK, lalu untuk berbagi data dan informasi, memudahkan integrasi layanan SPBE, dan meningkatkan efisiensi biaya SPBE.
2	Arsitektur SPBE Kota Bandung seperti yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2021, memiliki visi “Integrasi proses dan data untuk mewujudkan SPBE yang efektif guna meningkatkan dukungan layanan publik dan kinerja aparatur”, maka untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi 1 SPBE Kota Bandung yaitu “Meningkatkan dan mengintegrasikan seluruh komponen TIK untuk setiap proses dalam siklus hidup TIK di lingkungan Pemerintah Kota Bandung”.

3	<p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 106 tahun 2021 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bandung Tahun 2021-2025 bahwa SPBE Kota Bandung dilaksanakan sesuai Arah dan Tahapan Pelaksanaan SPBE Kota Bandung Tahun 2021-2025 dimana di tahap 2 dilaksanakan Optimasi Integrasi dan Peningkatan Kapasitas Layanan SPBE melalui :</p> <p>1. optimasi Sistem Penghubung Layanan (SPL), mencakup: SPL Internal dan SPL Eksternal. SPL Internal untuk meningkatkan integritas data, aplikasi dan layanan SPBE intra Pemerintah Daerah Kota, yang menghubungkan semua sistem TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. SPL Eksternal untuk meningkatkan integritas data, aplikasi dan layanan yang terhubung dengan Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah lain, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi Jawa Barat.</p> <p>2. optimasi Integrasi Data, melanjutkan integrasi master data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, untuk mewujudkan 'satu data' Kota Bandung.</p> <p>3. optimasi Integrasi User Management, melanjutkan integrasi user management yang mencakup user Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung, user masyarakat (citizen) dan user badan hukum (baik badan hukum komersial maupun nonkomersial) yang menjadi target Layanan SPBE Kota Bandung.</p> <p>4. optimasi Integrasi Layanan dengan Instansi Pemerintah (IP) dan Pemerintah Daerah (PD) lainnya, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi Jawa Barat.</p> <p>5. perluasan dan Integrasi Keamanan SPBE, melanjutkan penerapan standar keamanan sehingga mencakup seluruh komponen SPBE Kota Bandung.</p> <p>6. optimasi Integrasi Aplikasi, optimasi integrasi internal diwujudkan dalam bentuk Super App yang memudahkan penggunaan Layanan SPBE yang didukung oleh aplikasi-aplikasi SPBE Kota Bandung.</p> <p>7. melanjutkan pendaftaran Aplikasi ke Kemenkominfo.</p> <p>8. peningkatan Kapasitas Sumber Daya TIK, melalui perencanaan kapasitas sumber daya TIK sesuai dengan kebutuhan peningkatan Layanan SPBE Kota Bandung, serta meningkatkannya untuk mencapai layanan optimal. Sumber daya TIK ini mencakup aspek teknologi (termasuk teknologi mobile dan IoT) dan Sumber Daya Manusia (melalui peningkatan kompetensi).</p>
4	<p>Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pasal 4 ayat (3) bahwa Diskominfo bertanggung jawab dan melaksanakan bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kota. Kemudian pada Pasal 5 ayat (5) bahwa Setiap Perangkat Daerah wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskominfo terkait perencanaan sistem TIK spesifik. Dengan demikian bahwa setiap perencanaan dan pengembangan sistem TIK pada prinsipnya wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka menertibkan dan mensinergikan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.</p>
Dasar Analisis Teknis	
1	Pedoman (Standar) Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (Diskominfo, 2017)
2	Modul Dokumen Pengembangan Perangkat Lunak (Diskominfo, 2018)
3	Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 554/Kep.806-Diskominfo/2018
4	Surat perihal SOP Pengembangan Sistem Informasi (Diskominfo, 2021)

Hasil Pemeriksaan
<p>Berdasarkan analisis terhadap Kerangka Acuan Kerja Aplikasi SIPESAT (Aplikasi Laporan Kerja Petugas Taman) yang telah dilakukan, disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan SIPESAT ini merupakan suatu Sistem Informasi Spesifik menggambarkan sebagian dari urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung yang dikembangkan untuk mendukung proses bisnis Perangkat Daerah,2. Belum ada sistem informasi sejenis yang mendukung proses bisnis yang sama,3. Sistem informasi yang dibangun/dikembangkan tidak memiliki fungsi yang telah ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung,4. Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan tidak menghasilkan data sejenis yang dimiliki oleh Perangkat Daerah lain. <p>Dengan demikian, aplikasi tersebut layak dibangun/dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). Untuk selanjutnya dalam mengembangkan dan membangun sistem informasi dimaksud agar memperhatikan aspek Optimasi Integrasi dan Peningkatan Kapasitas Layanan SPBE sesuai Peta Rencana SPBE Tahun 2021-2025.</p>
<p>Berdasarkan hasil analisis teknis dan komunikasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. User Requirement sudah didefinisikan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung2. Sesuai ketentuan, Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyanggupi untuk menyediakan fasilitas untuk interoperabilitas / integrasi dengan sistem yang lain, melauai penyediaan API3. Platform Database dan Bahasa Pemrograman sudah sesuai standar. <p>Berdasarkan hal tersebut, ditinjau dari aspek kebutuhan, maka secara teknis, aplikasi tersebut layak untuk dikembangkan.</p>

Bandung, 26 Juli 2022
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika